RINGKASAN

Cahya Safitri
NIM 247410101070

Mendedah *Restorative Justice* Dalam Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Kuhap (Dr. Muhammad Nur, S.H.,M.H. dan Dr. Joelman Subaidi, S.H.,M.H.)

Pergeseran paradigma hukum pidana dari pendekatan retributif ke restoratif menjadi sangat urgen dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas berat. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara eksplisit mengatur mekanisme Keadilan Restoratif, penerapannya pada kasus yang mengakibatkan korban jiwa atau luka berat menimbulkan ketegangan norma (Pertentangan aturan) yang kompleks, yakni antara pengecualian untuk tindak pidana karena kealpaan (Pasal 82 huruf e) dan larangan mutlak untuk tindak pidana terhadap nyawa orang (Pasal 82 huruf f). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif dan mekanisme prosedural penerapan *Restorative Justice* dalam tahap penyidikan, menafsirkan ketegangan norma tersebut, serta mengevaluasi implikasi yuridisnya terhadap asas kepastian hukum dan tujuan pemidanaan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dan memberikan solusi menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis.

Menunjukkan bahwa ketegangan norma dalam Pasal 82 dapat diharmonisasikan melalui penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* dan penafsiran yang melihat tujuan/niat dibuatnya pasal tersebut. Kecelakaan lalu lintas berat yang murni didasari unsur kealpaan (*culpa*) dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif, sepanjang memenuhi syarat pemulihan korban, kesepakatan sukarela tanpa paksaan, dan pengawasan yudisial ketat berupa penetapan ketua pengadilan negeri dalam waktu 3 hari (Pasal 84). Temuan ini memberikan kontribusi teori hukum baru yang menjembatani kepastian hukum formal dengan keadilan substantif, sekaligus mencegah risiko "perdataisasi perkara pidana".

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan keadilan *Restorative Justice* dalam kasus ini membawa perubahan hukum yang positif, asalkan diterapkan secara jujur dan mengikuti aturan yang ketat. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji aspek empiris (*socio-legal research*) mengenai efektivitas penerapan norma ini di lapangan serta urgensi penyusunan peraturan pelaksana teknis guna menstandarisasi nilai restitusi.

Kata Kunci: ***Restorative Justice, Kecelakaan Lalu Lintas Berat, Ketegangan Norma, Kepastian Hukum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025.***

ABSTRACT

Cahya Safitri
NIM 247410101070

Examining Restorative Justice In The Investigation Of Traffic Accident Crimes Based On The Criminal Prosedure Code KUHAP
(Dr. Muhammad Nur, S.H.,M.H. dan Dr. Joelman Subaidi, S.H.,M.H.)

A paradigm shift in criminal law from a retributive to a restorative approach is highly urgent in handling serious traffic accidents. Although Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) explicitly regulates the Restorative Justice mechanism, its application to cases resulting in fatalities or serious injuries creates complex normative tensions, namely between the exception for criminal acts due to negligence (Article 82 letter e) and the absolute prohibition of criminal acts against human life (Article 82 letter f). This study aims to analyze the normative construction and procedural mechanisms of the application of Restorative Justice during the investigation stage, interpret these normative tensions, and evaluate their legal implications for the principle of legal certainty and the objectives of punishment.

This study uses a normative juridical method with a statutory, conceptual, and case-based approach. Data collection was conducted through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed qualitatively and prescriptively using grammatical, systematic, and teleological interpretation methods.

The results of the study indicate that the tension between norms in Article 82 can be harmonized through the application of the principle of lex specialis derogat legi generali and interpretation that considers the purpose and intent behind the enactment of the article. Serious traffic accidents purely based on negligence (culpa) can be resolved through a restorative mechanism, as long as they meet the requirements for victim recovery, voluntary agreement without coercion, and strict judicial oversight in the form of a determination by the head of the district court within 3 days (Article 84). This finding contributes a new legal theory that bridges formal legal certainty with substantive justice, while preventing the risk of "civilization of criminal cases."

It is concluded that the application of Restorative Justice in this case is a constructive and humane legal transformation, provided it is enforced with integrity and strict parameters. For further research, it is recommended to examine the empirical aspects (socio-legal research) regarding the effectiveness of implementing this norm in the field and the urgency of developing technical implementing regulations to standardize restitution values.

Keywords: Restorative Justice, Serious Traffic Accidents, Normative Tension, Legal Certainty, Law Number 20 of 2025